

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi berbagai fenomena pembangunan di tingkat daerah, nasional dan internasional dengan pemerataan dan pertumbuhan yang diinginkan sejalan dalam proses pembangunan tanpa menimbulkan trade-off satu sama lainnya.

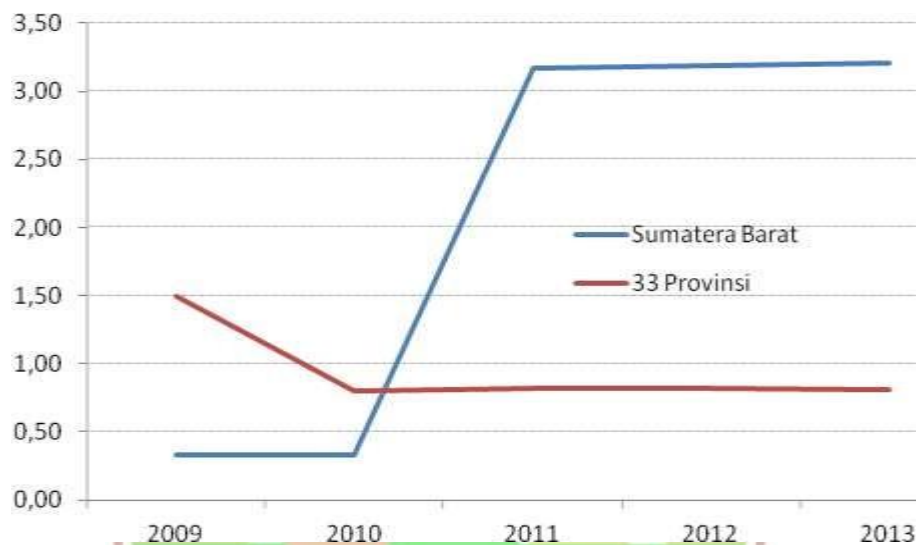
Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang tersedia sehingga membentuk suatu kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Dimana adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju (Sjafrizal, 2008).

Bila ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut cukup besar, maka hal ini dapat membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik. Sehingga menyebabkan kurang efesiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (kemakmuran). Dari segi sosial memicu terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial, bahkan kondisi tersebut mempunyai implikasi politik yang mendorong timbulnya keinginan masyarakat dan organisasi politik untuk melakukan pemekaraan daerah. (Sjafrizal, 2014)

Dari 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat memiliki sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, jumlah dan kepadatan penduduk, letak geografis, serta sarana dan prasarana yang tersedia berbeda-beda. Sehingga kemampuan pengembangan di daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Tingkat kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013, berada di atas nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten di Sumatera Barat terlihat dari besarnya gap PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Nilai PDRB Perkapita tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah di Kota Padang dikarenakan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat didukung oleh infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga mendukung perekonomian daerah. Kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong

meningkatkan ketimpangan antar wilayah karena proses pembangunan yang akan lebih cepat dari pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah (Sjafrizal,2008)

Sumber daya manusia akan menentukan karakter dan kecepatan dari pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa (Todaro dan Smith,2006). Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah-daerah yang di tinggalkannya mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih rendah karena didukung oleh sumberdaya potensial yang telah berpindah tersebut. Ini juga akan secara langsung akan mengalami ketimpangan pembangunan.

Aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebab, perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi terhadap cara pembangunan yang akan di terapkan berbeda (Sjafrizal, 1997).

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberikan wewenang

pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah untuk pembangunan daerah.

Adanya otonomi dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing (Sasana, 2009). Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan regional (Majidi,1997).

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis tertarik untuk mencoba melihat hasil dari perkembangan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini yaitu dimulai dari tahun 2004 yang mana terjadi pemekaraan daerah sampai pada tahun 2013 di Sumatera Barat yang dilihat dari pertumbuhan PDRB setiap daerah serta mengetahui pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan alokasi Dana Perimbangan setiap daerah kabupaten dan kota terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat. Yang dalam hal ini akan penulis tuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT Periode 2004 - 2013 ”**

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang nampak di Sumatera Barat adalah tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson pada tahun 2009-2013 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Dimana Kesenjangan

ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berada di atas kesenjangan ekonomi nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Tingginya kesenjangan ekonomi ini berpengaruh kepada bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan diatas permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

- a. Berapa besarkah tingkat ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat selama periode tahun 2004-2013 berdasarkan Indeks Williamson ?
- b. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks pengembangan Manusia dan alokasi Dana Perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui besar tingkat ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat berdasarkan Indeks Williamson.
- b. Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan alokasi Dana Perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat mengenai arah kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan dan dalam merencanakan program pembangunan untuk menurunkan ketimpangan pembangunan antar daerah di wilayah provinsi Sumatra Barat.
- 2) Bagi penulis sebagai wacana untuk mengaplikasikan pemahaman tentang teori-teori yang didapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan Fakultas Ekonomi UNAND serta peneliti dan akademis yang ingin melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Tahun periode penelitian yaitu tahun 2004 – 2013.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab II ini menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, alokasi Dana Perimbangan dan Ketimpangan Pembangunan. Hasil Temuan sebelumnya dan Hipotesa

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang data dan sumber data, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisa dengan menggunakan uji hipotesa, serta variabel dan defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang perkembangan dan gambaran umum kota dan kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2004 – 2013. Dan juga menjelaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan PDRB di Sumatera Barat, perkembangan IPM di Sumatera Barat serta perkembangan alokasi dana perimbangan di Sumatera Barat. Sekaligus menjelaskan perkembangan ketimpangan Pembangunan di Sumatera Barat pada periode 2003–2014.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

